

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Max Weber mendefinisikan administrasi atau birokrasi pada dasarnya sebagai suatu sistem organisasi yang memiliki banyak batasan, seperti sistem administrasi. Batasan-batasan ini mendorong tindakan rutin yang menekankan keseragaman, adanya sistem yang diselenggarakan dengan cara-cara atau aturan tertulis, dan birokrasi yang dijalankan oleh aktor berkompeten di bidang mereka (Weber, 1987). Saat berbicara tentang reformasi administrasi, itu berarti keinginan atau dorongan untuk terjadi perubahan dalam administrasi melalui tindakan yang direncanakan dan disengaja. Dengan demikian, ada hambatan untuk membangun pemerintahan yang bersih (*clean government*) (Caiden, 1978). Dengan demikian, reformasi administrasi atau birokrasi mencakup penghapusan kebijakan, program, strategi, dan kegiatan inovatif lainnya, serta perubahan struktur dan birokrasi melalui reorganisasi atau aspek kelembagaan serta perubahan sikap dan perilaku birokrat untuk mencapai tujuan organisasi dan nasional (Quah, 2010).

E-government, atau pemerintah elektronik, dapat meningkatkan sistem pemerintahan dengan melakukan reformasi birokrasi seperti modernisasi struktur dan prosedur birokrasi (Nissa & Adhi, 2018). Selain itu, sistem informasi yang terintegrasi diperlukan untuk menerapkan *e-government* (Weerakkody, El-Haddadeh, & Al-Shafi, 2011). *E-government* juga berfungsi sebagai cara yang efektif untuk menghilangkan masalah birokrasi yang merupakan salah satu tujuan reformasi birokrasi (Dror, 1976). Selain itu, di

tengah era disrupsi saat ini, menggunakan *e-government* untuk mengelola pemerintahan menjadi wajib di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Mustapa, 2011).

Menurut World Bank, *e-government* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan bisnis sekaligus memfasilitasi kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya. Selain itu, Kasiyanto dalam Kusuma Habibie (2019), mendefinisikan *e-government* sebagai bentuk penerapan teknologi elektronik pada berbagai fungsi internal dan eksternal pemerintahan (pelayanan publik) untuk mencapai kinerja yang efisien, efektif, cepat dan transparan. *E-government* dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak lain, yang kemudian melahirkan berbagai bentuk *e-government*, yaitu *government-to-government* (G2G), *government-to-businesses* (G2B), *government-to-employees* (G2E), dan *government to citizen* (G2C) (Habibie, 2019). Dengan banyaknya kontribusi *e-government* terhadap sistem pemerintahan, penerapan *e-government* memungkinkan tata kelola pemerintahan yang cepat dan fleksibel, yang merupakan salah satu hasil cepat untuk percepatan reformasi birokrasi (Menpan.go.id, 2020). Dengan demikian, kerangka penerapan *e-government* sejalan dan mendukung keberhasilan pencapaian sasaran reformasi birokrasi sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) (Adrianto, 2007; Gaus, Sultan, & Basri, 2016).

Seiring kemajuan zaman, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berdampak pada perkembangan *e-government* yang

diadopsi oleh sektor (Santa et al., 2019). Dalam hal ini, dorongan internal dan eksternal mendorong pertumbuhan *e-government* di seluruh dunia. Tekanan internal yang berbeda dapat mendorong negara untuk menerapkan *e-government*. Menurut OECD (2005), selama tahun 1980-an dan 1990-an, banyak pemerintah terkena dampak dari *New Public Management* (NPM), yang memisahkan desain layanan dari penyediaan layanan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah. Dorongan internal ini sering menciptakan agenda *e-government* yang berpusat pada peningkatan efisiensi (OECD, 2005). Implementasi *e-government* sebagai respons terhadap tekanan internal untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik melalui penerapan prinsip-prinsip NPM (Mergel, 2018).

Castelnovo (2010) berpendapat bahwa kegagalan proyek *e-government* dapat berasal dari mengabaikan aspek non-teknologi, seperti proposisi nilai, karena organisasi memiliki keunggulan dalam persaingan jika mereka mempertimbangkan nilai dan penggunaan TIK. Sebagai contoh, penelitian saat ini tentang TIK dan *e-government*, terutama yang dilakukan di negara-negara maju, menunjukkan bahwa tidak ada yang disebut sebagai "paradoks *e-government*", sebuah gagasan bahwa jika proyek adopsi *e-government* tidak menghasilkan manfaat, mereka akan dianggap gagal oleh beberapa pemangku kepentingan karena mereka tidak dapat memprediksi manfaatnya (Castelnovo & Ferrari, 2013; Castelnovo & Simonetta, 2008).

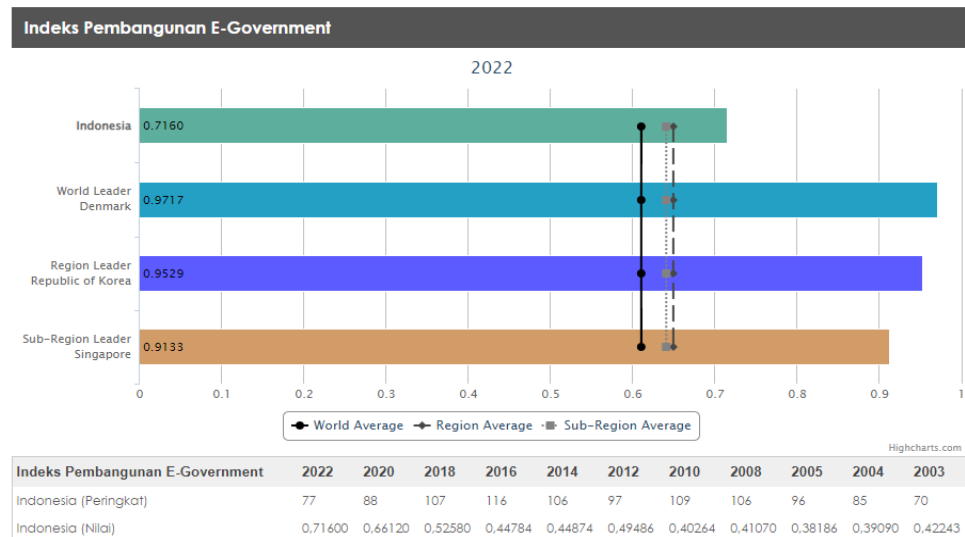
Untuk mewujudkan potensi *e-government* bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam hal ini, adalah penting untuk menghitung nilai yang akan diperoleh setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Penelitian saat

ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam menerapkan *e-government* di banyak negara berkembang disebabkan oleh kegagalan untuk mempertimbangkan aspek non-teknologi dalam implementasi *e-government* serta proposisi nilai untuk proyek *e-government*. Pendekatan nilai, juga dikenal sebagai posisi nilai, menekankan pentingnya nilai dalam pengelolaan *e-government* dan menjadikan nilai sebagai fokus utama dalam pengembangan kebijakan dan program *e-government*. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan layanan administratif pemerintah akan lebih efisien, produktif, dan akuntabel.

Reorganisasi proses dan reorganisasi struktural, serta reformasi lembaga publik, biasanya mengikuti upaya implementasi *e-government* (Torres et al., 2005; Jansen & Lovdal, 2009). Banyak negara berkembang telah menerapkan inisiatif *e-government* untuk membangun *e-government* yang efektif (Deng et al., 2018). Indonesia juga mengambil inisiatif ini, di mana *e-government* menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi (Wargadinata et al., 2022). Dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, yang bertujuan untuk memastikan keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan.

Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta keandalan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Dari 2008 hingga 2019, Indonesia membuat kemajuan besar dalam

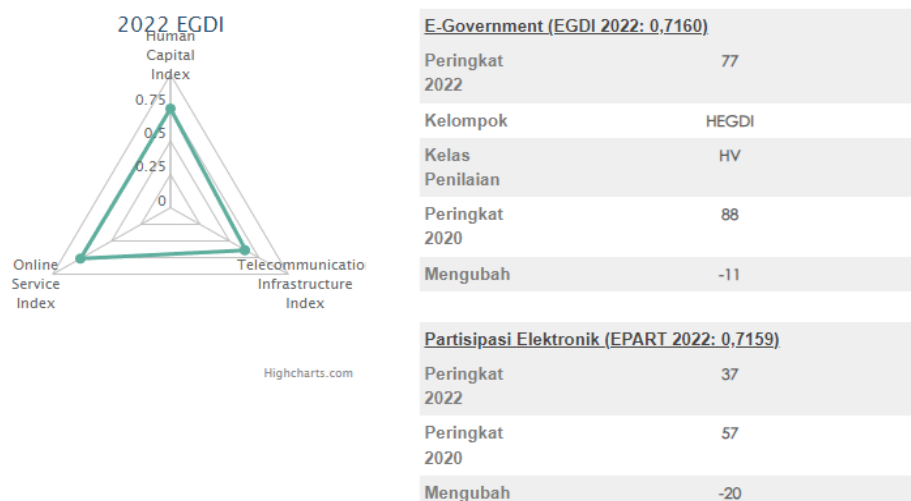
meningkatkan kualitas layanan publiknya. Dalam praktiknya, menunjukkan bahwa dari 193 negara di seluruh dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-77, di atas negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam (Saefudin, 2022). Hal ini menggembirakan karena Indonesia naik secara signifikan dari peringkat ke-88 pada tahun 2020. Ini menunjukkan kemajuan dalam penerapan *e-government*, yang merupakan hasil kerja keras tim pelaksana, seluruh K/L, dan pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan, meskipun peringkatnya meningkat. Salah satu contohnya adalah memperkuat infrastruktur telekomunikasi, yang merupakan poin paling rendah dalam penilaian. Namun, untuk memaksimalkan semua elemen dalam penerapan *e-government* di Indonesia, penguatan elemen sumber daya manusia, layanan, dan tata kelola yang memiliki nilai sedikit di atas rata-rata juga tentu akan mendapat perhatian.



Sumber: *United Nations (UN) E-government Development Index 2022*

Gambar 1.1
Perbandingan Peringkat Indonesia dengan Beberapa Negara Lain

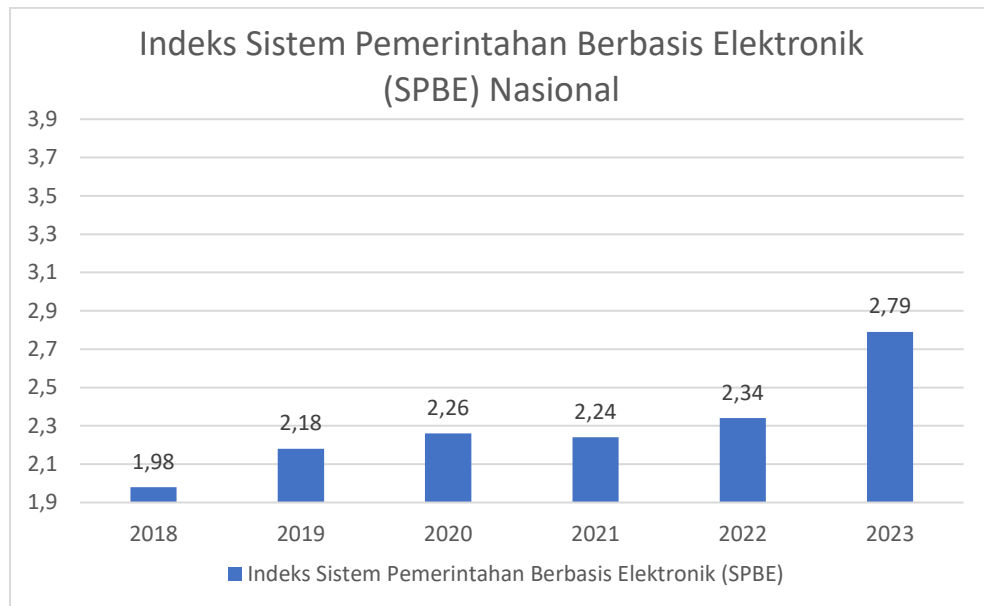
Dengan didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, kesinambungan, keterpaduan, interoperabilitas, akuntabilitas, dan keamanan informasi, *e-government* pasti akan diterapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Menurut survei yang dilakukan oleh *United Nations E-government Development Index*, implementasi *e-government* seperti berikut.



Sumber: *United Nations (UN) E-government Development Index 2022*

Gambar 1. 2
Peringkat *E-Government* Indonesia di Dunia Tahun 2022

Perpres SPBE juga menetapkan pembentukan Tim Koordinasi SPBE Nasional. Tim ini akan mengawasi tujuh K/L sesuai dengan tugasnya masing-masing. Menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 tahun 2018, Kementerian PANRB sebagai ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional memulai pelaksanaan evaluasi berkala dengan instrumen penilaian. Dalam hal evaluasi mandiri SPBE, Kementerian PANRB bertanggung jawab atas pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi. Evaluasi SPBE pertama kali dilakukan pada tahun 2018 dengan hasil Indeks SPBE Nasional sebesar 1,98 dengan predikat Cukup. Selanjutnya Indeks SPBE Nasional akan ditampilkan sebagai berikut.



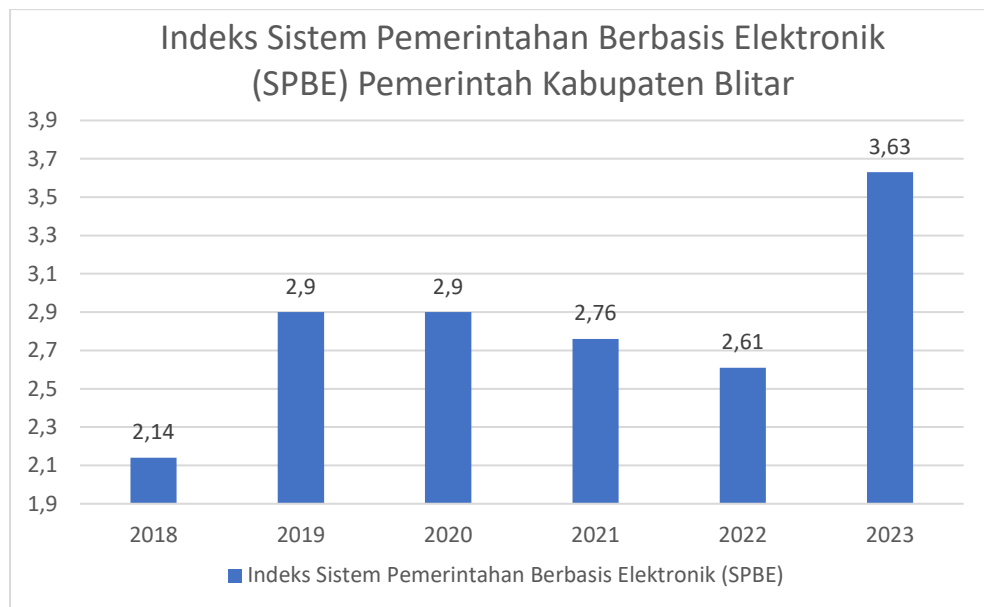
Sumber: Keputusan Menteri PAN-RB diolah kembali oleh peneliti

Gambar 1.3
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

Indeks SPBE Nasional naik sebesar 0,2 menjadi 2,18 pada tahun 2019 dengan predikat cukup. Pada tahun 2020, indeks kembali naik sebesar 0,08 menjadi 2,26 dengan predikat cukup. Pada tahun 2021, indeks sedikit turun sebesar 0,02 menjadi 2,24, tetapi tetap dengan predikat cukup. Pada tahun 2022, indeks kembali naik sebesar 0,1 menjadi 2,34 dengan predikat cukup. Hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023, yang melibatkan 621 lembaga pemerintah, telah diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Indeks SPBE Tahun 2023 mencapai lebih dari 2,6 dengan nilai 2,79 yang mendapat predikat baik.

Meneruskan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), ditetapkan suatu Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Adanya Perbub ini memberi dampak signifikan terhadap hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun ke tahun, sebagai berikut.



Sumber: Keputusan Menteri PAN-RB diolah kembali oleh peneliti

Gambar 1.4
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemkab Blitar

Sebelum Perbup tersebut disahkan, implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sempat mengalami kenaikan dan berangsur turun. Namun, setelah Perbup Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) disahkan, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup pemerintah kabupaten blitar mengalami kenaikan yang signifikan. Indeks dari yang sebelumnya 2,61 pada tahun 2022 menjadi 3,63 pada tahun 2023. Dengan skor 3,63, pemerintah Kabupaten Blitar dinilai berhasil mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melampaui indeks nasional sebesar 2,79. Oleh karenanya, dapat dilihat bahwa pemerintah kabupaten Blitar terus berusaha untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan SPBE di lingkup kabupaten Blitar untuk menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga pelayanan administratif menjadi lebih baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar disingkat Setda Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati Blitar dalam perumusan kebijakan dan koordinasi administratif terkait pelaksanaan tugas juga pelayanan administratif. Setda Kabupaten Blitar sebagai salah satu perangkat daerah yang ikut andil dalam berbagai bidang dan diharapkan menjadi lembaga pemerintah yang menerapkan kerja cerdas (*smart working*) dengan mengembangkan inovasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai misi *smart governance*. Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, kinerja pegawai, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Dalam aktualisasinya, penggunaan teknologi telah menjadi kekuatan yang dapat mendorong transformasi dan pola pikir birokrasi. Paradigma ini memungkinkan penggunaan teknologi untuk mempermudah pekerjaan di dalam dan di luar organisasi. Salah satu fokus urusan pemerintahan adalah sistem teknologi yang memadai, lembaga sedang membangun sistem internal dengan menggunakan teknologi ini yang memungkinkan integrasi data dan

penyimpanan yang baik. Dalam proses administratif, Setda Kabupaten Blitar memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Banyak inovasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi dilakukan setiap hari di Setda Kabupaten Blitar dan di berbagai bidang kerja. Dengan mempertimbangkan kebutuhan saat ini, inovasi dibuat untuk meningkatkan kualitas administratif.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi administratif, kendaraan dinas menjadi komponen yang tidak terpisahkan. Kendaraan dinas digunakan dalam mobilitas pejabat dan staf, pemenuhan operasional harian, serta mendukung keberhasilan berbagai proyek dan program pemerintah daerah, juga anggaran pengelolaannya yang besar. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dihadapkan pada tantangan efisiensi pengelolaan kendaraan umum. Proses manual dalam pengelolaan dan pemeliharaan armada sering kali menyebabkan keterlambatan, ketidakakuratan, dan kurangnya transparansi dalam penggunaan kendaraan dinas.

Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Penerapan aplikasi “SIPEKEN” menawarkan potensi besar untuk mempermudah dan meningkatkan pengelolaan kendaraan pemerintah melalui kemudahan akses dan pendataan yang akurat. Transformasi teknologi dalam pengelolaan armada pemerintah diharapkan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas administratif seperti pencatatan penggunaan kendaraan, pemeliharaan rutin, dan pelaporan. Hal ini memungkinkan staf administrasi untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis.

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan armada pemerintah juga sejalan dengan tuntutan efisiensi anggaran. Manajemen yang lebih efisien dapat mengurangi biaya pengoperasian dan pemeliharaan armada secara keseluruhan. Banyak instansi pemerintah yang berhasil menerapkan solusi digital di berbagai aspek operasionalnya. Transformasi digital ini mendorong Sekretariat Jenderal Setda Kabupaten Blitar mengambil solusi serupa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Dulunya, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar mengelola kendaraan secara manual. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pengelolaan kendaraan dinas, meliputi kerusakan kendaraan apabila kendaraan tergolong baru, macet di jalan, ban pecah, atau keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Ada banyak kemungkinan penyebab kegagalan yang menyebabkan penggunaan kendaraan darurat dan dinas tidak optimal dan pengelolaannya masih manual.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi sangat bergantung pada dukungan pimpinan. Ini termasuk membantu dalam penerapan *Standart Operation Procedure* (SOP), pembuatan peraturan, dan produk hukum yang mendukung. Tidak boleh dilupakan juga bahwa diperlukan dukungan dalam hal sarana dan prasarana teknologi, seperti ketersediaan perangkat komputer dan perangkat elektronik lainnya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan *e-office*.

Dengan realitas masalah diatas berupa:

- a. penurunan indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2022 padahal indeks SPBE Nasional mengalami kenaikan;
- b. kegagalan *e-government* sering terjadi karena mengabaikan aspek

- non-teknologi, seperti proposisi nilai;
- c. *e-office* memerlukan bergantung kepada keputusan pimpinan dan dukungan dalam hal sarana-prasarana; dan
- d. kendaraan dinas merupakan operasional dinas yang digunakan untuk menunjang program pemerintah dan anggaran pengelolaannya yang besar

menjadi menarik, sehingga dapat dianalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi *e-office* pengelolaan kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Oleh karena paparan tersebut, peneliti mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi *E-Office* Pengelolaan Kendaraan Dinas (Studi Aplikasi SIPEKEN, Bagian Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Apa faktor yang memengaruhi implementasi *e-office* pengelolaan kendaraan dinas pada Aplikasi SIPEKEN, Bagian Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar?
- b. Apa kendala pada implementasi *e-office* pengelolaan kendaraan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk sebagai berikut.

- a. Mengetahui faktor-daktor yang memengaruhi *e-office* pengelolaan kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
- b. Mengetahui kendala pada implementasi *e-office* pengelolaan kendaraan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teori

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang memengaruhi *e-office* dengan menggunakan teori *e-government*. Selain itu, penelitian ini dapat berguna sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman tentang masalah yang menjadi subjek penelitian. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memperluas pengetahuan dan perspektif ilmiah di bidang ilmu administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk memberi peneliti pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi *e-office* pengelolaan kendaraan dinas (SIPEKEN), sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk melaksanakan pengabdian di masa mendatang.
- b. Penelitian ini juga dapat membantu Setda Kabupaten Blitar membuat keputusan kebijakan dan strategis dengan memberikan

saran dan masukan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan kendaraan dinas.

- c. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh Universitas Islam Balitar sebagai referensi penelitian lebih lanjut. Khususnya, dalam implementasi *e-office* pengelolaan kendaraan dinas.